

Perkembangan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Titony Tanjung¹, Bermawi Nasution², Ridwal Trisoni³

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar; Bawaslu Kab Solok
titonytanjung@gmail.com, bermawinasution77@gmail.com

ABSTRACT

As time goes by, the education Sistem in Indonesia dynamically follows the times. This development can be seen from changes in the current learning curriculum. Education plays an important role in determining the future of a nation. The Indonesian education Sistem that applies nationally functions to develop students' abilities. In this case, the education Sistem acts as a means to improve students' intellectual, physical and emotional abilities so that they are able to contribute to nation building. National education is education based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is rooted in religious values, Indonesian national culture and responsive to the demands of changing times. Indonesia has its own national education Sistem which implements 12 years of compulsory education, namely nine years of basic education which includes six years in elementary school and three years each in middle school and high school.

Keywords: Education Sistem, change and development of education

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. perkembangan tersebut dapat dilihat dari pergantian kurikulum belajar yang berlaku. Pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Sistem pendidikan Indonesia yang berlaku secara nasional adalah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam hal ini, sistem pendidikan berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan intelektual, fisik, dan emosional peserta didik agar mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Indonesia memiliki sistem nasional pendidikan tersendiri yang menerapkan wajib belajar 12 tahun, yaitu sembilan tahun pendidikan dasar yang meliputi enam tahun di sekolah dasar serta masing-masing tiga tahun di SMP dan SMA.

Kata Kunci: Sistem Pendidikan, perubahan dan perkembangan pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Sebagai landasan pembangunan, sistem pendidikan nasional di Indonesia berfungsi sebagai tulang punggung bagi pembangunan bangsa dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan perubahan global dinamika, tantangan, dan potensi yang semakin kompleks, Indonesia perlu terus mengubah sistem pendidikannya

untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar global.

Semua aspek kemajuan dan pembangunan bangsa bergantung pada pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan akan menentukan kualitas sumberdaya manusia dan kemajuan negara dalam arah yang lebih baik, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam sejarah perkembangan sistem pendidikan nasional Indonesia, banyak perubahan telah dicatat sejak masa merdeka hingga saat ini. Paradigma dan perubahan politik telah menyebabkan perubahan besar dalam pendekatan kurikulum, teknik pembelajaran, dan tujuan pendidikan.

Kesadaran akan peran strategis pendidikan dalam menghadapi dinamika global menjadikan penting untuk mengevaluasi perkembangan sistem pendidikan nasional. Untuk memahami kemajuan, keberhasilan, dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, yang masih merupakan negara berkembang, melakukan perbandingan antara sistem pendidikan saat ini dan sebelumnya sangat penting untuk menargetkan kemajuan, keberhasilan, dan tantangan yang dihadapi.

Untuk mengidentifikasi perubahan yang telah terjadi dan untuk mengevaluasi dampak dari perubahan tersebut, adalah penting untuk membandingkan sistem pendidikan saat ini dengan sistem sebelumnya. Sejarah perkembangan pendidikan nasional mencatat berbagai kebijakan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, yang mencerminkan visi dan nilai-nilai masyarakat saat itu. Perubahan kurikulum, pendekatan pembelajaran, dan kualitas pendidikan merupakan indikator penting untuk mengukur efektivitas sistem pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan menggunakan kajian terhadap referensi atau literatur yang relevan. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Nursapia, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan tentang manajemen dan kepemimpinan serta fungsi-fungsinya dalam penjaminan mutu pendidikan islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, verifikasi data dan pengambilan kesimpulan. Data dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi pertanyaan penelitian, dianalisis, diinterpretasikan dan disimpulkan dengan menggunakan analisis teori dan sumber data yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Sistem Pendidikan Nasional

Sesuai UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan mengacu pada upaya yang disengaja dan terorganisir untuk membangun lingkungan dan proses yang memfasilitasi siswa dalam secara aktif memelihara kemampuan mereka untuk memiliki kekuatan agama dan spiritual, disiplin diri, individualitas, kecerdasan,

karakter moral, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dipengaruhi oleh keyakinan agama, budaya nasional Indonesia, dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sistem Pendidikan Nasional dapat dipahami sebagai unsur-unsur kolektif pendidikan yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

(M. Wahib MH *et al.*, 2022) Sistem pendidikan nasional adalah kumpulan komponen pendidikan yang saling berhubungan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan sistem dan organisasi yang mengawasi dan mengelola proses pendidikan di suatu negara. Sistem ini mencakup kebijakan, kurikulum, lembaga pendidikan, pendidik, dan komponen lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional. Pentingnya sistem pendidikan nasional terletak pada perannya dalam mencetak individu yang kompeten, membina masyarakat yang berpendidikan, dan memfasilitasi kemajuan negara secara keseluruhan.

Sistem pendidikan dapat berbeda dari satu negara ke negara lain, tergantung pada nilai-nilai lokal, budaya, dan persyaratan. Tujuan keseluruhannya adalah untuk membangun masyarakat yang berpengetahuan, kreatif, dan mampu bersaing dalam skala global. Pendidikan nasional bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan dan membentuk nilai-nilai dan budaya bangsa yang dihormati. Tujuannya adalah untuk mendidik individu yang memiliki iman dan rasa hormat kepada Tuhan, memiliki karakter bajik, sehat secara fisik, berpengetahuan luas, terampil, kreatif, mandiri, dan mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

B. Perkembangan Sistem Pendidikan di Indonesia

(M. Wahib MH *et al.*, 2022) Sistem pendidikan atau kurikulum pendidikan di Indonesia sering mengalami modifikasi, khususnya pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006, 2013, dan yang terbaru adalah kurikulum Merdeka. Di setiap periode, selalu ada kerangka kerja untuk setiap era di bidang pendidikan di Indonesia, karena kehadiran kerangka kerja membantu memastikan bahwa pendidikan di Indonesia terstruktur dengan baik dan berfungsi dengan baik.

1. Sistem Pendidikan pada masa penjajahan

Sistem pendidikan di Indonesia selama masa kolonial Belanda tidak hanya berfungsi sebagai metode pendidikan, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan dominasi kolonial dan melindungi kepentingan otoritas kolonial Belanda. Pendidikan selama periode itu diciptakan untuk memenuhi persyaratan administrasi kolonial Belanda, dengan menawarkan kesempatan terbatas kepada masyarakat adat. Keturunan Belanda dan priyayi (kelas atas pribumi yang bekerja untuk otoritas kolonial) menerima standar pendidikan yang lebih tinggi.

Era pendidikan selama pemerintahan kolonial Jepang di Indonesia dapat dilihat sebagai periode yang memiliki pengaruh multifaset. Kurikulum sekolah dibuat kurang kompleks, dengan fokus pada pembelajaran praktis dan kemampuan yang dianggap menguntungkan bagi tujuan militer dan ekonomi Jepang. Selain metode pendidikan Belanda dan Jepang, ada juga paradigma pendidikan pesantren Islam. Pesantren Salafiyah adalah jenis lembaga Islam di masyarakat dan kemudian diintegrasikan ke dalam sistem nasional di Indonesia.

2. Sistem Pendidikan pada masa orde lama

Selama era Orde Lama di Indonesia, yang membentang dari kemerdekaan sampai akhir pemerintahan Sukarno (1945-1966). Pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan tahun 1945-1950 masih berada dalam situasi yang menantang. Bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan pada awal kemerdekaannya, dengan perubahan signifikan terjadi tidak hanya di bidang pemerintahan tetapi juga di sektor pendidikan. (Ardiana Sari Dangu), I Ketut Laba Sumarjiana), 2022) Praktik pendidikan setelah kolonialisme menekankan pembentukan rasa patriotisme, ada modifikasi yang berbeda dalam sistem pendidikan.

Beberapa ciri khas sistem pendidikan pada masa ini antara lain:

- Konsep Pancasila sebagai Dasar Pendidikan
- Nasionalisasi Pendidikan di mana pemerintah mengambil alih kendali pendidikan dari pihak swasta, terutama yang berhubungan dengan tingkat pendidikan dasar.
- Program Wajib Belajar Enam Tahun
- Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Pengantar:
- Kesetaraan Pendidikan untuk Perempuan:

3. Sistem Pendidikan pada masa orde baru

Orde Baru membentang dari tahun 1968 hingga 1998 dan dapat dianggap sebagai fase kemajuan nasional. Di bidang pengembangan pendidikan, khususnya di bidang pendidikan dasar, terdapat Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pendidikan Dasar. Pemerintah Orde Baru mengamanatkan bahwa anak-anak antara usia 7 dan 12 harus menghadiri sekolah dasar, yang umumnya dikenal sebagai pendidikan wajib, untuk jangka waktu 6 tahun.

(Ardiana Sari Dangu), I Ketut Laba Sumarjiana), 2022) Kurikulum yang diperkenalkan pada tahun 1975 adalah kurikulum pertama selama masa Orde Baru yang menggabungkan pengajaran filsafat Pancasila di semua tingkat pendidikan. (M. Wahib MH *et al.*, 2022) Kurikulum pada tahun 1984 memasukkan peran siswa yang disebut Metode Pembelajaran Siswa Aktif (CBSA). EBTANAS dan UMPTN adalah ujian yang menilai kemampuan intelektual mahasiswa.

4. Sistem Pendidikan pada masa setelah reformasi

Program pendidikan baru, revolusioner, dan reformatif memiliki

banyak ruang untuk tumbuh berkat era reformasi. Kurikulum mengambil format berbasis kompetensi. Selama periode ini, pemerintah memprioritaskan pendanaan untuk pendidikan minimal 20% dari anggaran negara agar sesuai dengan ketentuan UUD 1945. (Triningsih, 2017) Ada banyak reformasi di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), wajib belajar sembilan tahun, meningkatkan standar pendapatan guru dengan sertifikasi guru, dan menawarkan bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk meningkatkan kompetensi guru, antara lain. Anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945, yaitu 20% dari APBN dan APBD.

Indonesia juga memiliki sejumlah modifikasi kurikuler selama periode ini. (M. Wahib MH *et al.*, 2022) Salah satu contoh modifikasi kurikulum adalah kurikulum 1999, yang pada dasarnya adalah kurikulum 1994 dengan beberapa penyesuaian kecil. 2), kurikulum Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004. 3) Kurikulum 2006, dikenal juga dengan KTSP (Knowledge Transfer Sistem Curriculum). Guru harus dapat mengembangkan kriteria ini dalam bentuk silabus, yang ditentukan oleh pemerintah pusat dalam hal kompetensi dasar. 4. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mendidik manusia Indonesia menjadi manusia yang mampu menjadi warga negara yang produktif, kreatif, inventif, dan baik yang juga dapat bersaing untuk mengembangkan peradaban baik di dalam negeri maupun global.

Kebijakan kurikulum Merdeka Belajar merupakan inovasi baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini memanfaatkan gagasan untuk menggabungkan kemajuan teknis dengan masalah yang dihadapi masyarakat. (Putra, 2019) Ide belajar mandiri meluas di luar kelas, di mana selalu menjadi topik diskusi di antara para guru. Tetapi Merdeka menemukan bahwa adalah mungkin untuk mencapai tujuan besar sambil tetap berada di dalam batas-batas duania.

Sistem Pendidikan Merdeka belajar mekankan pada pembentukan karakter siswa. Pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan didalam ruangan, tetapi dapat juga dilakukan diluar ruangan. (Marisa, 2021), empat pokok kebijakan Merdeka belajar, yakni:

1. Ujian Nasional (UN) ditiadakan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum serta survei karakter.
2. Ujian Sekolah berstandar Nasional (USBN) diserahkan seutuhnya kepada sekolah masing-masing
3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
4. Penerimaan Peserta didik baru (PPDB), ditekankan pada penerapan sisten Zonasi, terkecuali untuk daerah 3T.

C. Implikasi Sistem Pendidikan Nasional terhadap Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah komponen fundamental dari Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam diakui dan disediakan di Indonesia untuk memenuhi tuntutan pendidikan masyarakat Muslim, yang merupakan mayoritas penduduk. Penyediaan akomodasi oleh negara untuk sistem pendidikan Islam memungkinkan pengembangan fondasi yang kuat untuk sistem dan lembaga pendidikan Islam, dengan dukungan keuangan dan perhatian dari pemerintah.

(Robiatul Awwaliyah, 2016) Pendidikan Islam adalah proses yang terstruktur dan terorganisir yang bertujuan untuk membina kemampuan siswa sesuai dengan ajaran agama Islam. Pendidikan Islam adalah bentuk pendidikan yang berupaya mendorong pengembangan pribadi holistik dengan berfokus pada pelatihan psikologis, rasionalitas, kecerdasan, emosi, dan panca indera yang dimiliki oleh individu.

Pendidikan di Indonesia secara historis beroperasi di bawah kerangka dualistik, dengan perbedaan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Dualisme ini berasal dari era kolonial ketika Belanda memperkenalkan sistem pendidikan sekuler, sementara pendidikan Islam, yang diwakili oleh pesantren, berfokus terutama pada ajaran agama tanpa banyak penekanan pada pengetahuan umum. Sistem dualistik ini bertahan bahkan setelah Indonesia merdeka, meskipun upaya dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

(Khotimah *et al.*, 2022) Peran pendidikan Islam dalam kerangka sistem pendidikan Nasional adalah merupakan komponen dari sistem pendidikan Nasional. Definisi pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan agama mengacu pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi peran yang melibatkan ajaran agama atau keahlian dalam ilmu agama.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia. Namun, terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaannya, seperti anggaran pendidikan yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat 1. Upaya untuk meningkatkannya secara substansial belum dilaksanakan dengan baik, sehingga memberikan penampilan yang sadar. Upaya untuk mereformasi dan meningkatkan pendidikan Islam sering terfragmentasi atau kurang komprehensif, dan sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara profesional.

(Robiatul Awwaliyah, 2016), Pasal 30 mengacu pada ajaran agama yang diatur oleh Pemerintah dan/atau kelompok agama di lingkungan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pendidikan agama bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan untuk merangkul dan menerapkan prinsip-prinsip ajaran agamanya, dan berpotensi menjadi sarjana agama. (3) Pendidikan agama dapat

ditempuh melalui jalur formal, nonformal, dan informal. (4) Contoh pendidikan agama antara lain pendidikan dinahiyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan pendekatan lain yang sejenis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem Pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, bersifat dinamis, bukan statis. Dimulai dari Sistem Pendidikan Kolonial Belanda, Sistem Pendidikan Militer Jepang, Sistem Pendidikan Orde Lama, Sistem Pendidikan Orde Baru, dan Sistem Pendidikan Reformasi. Memiliki pengetahuan tentang sejarah sistem pendidikan Indonesia sangat penting sebagai dasar bagi kemajuan pendidikan Indonesia di masa depan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memperkenalkan inisiatif baru yang dikenal sebagai kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini menggabungkan gagasan untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan isu-isu masyarakat. Sistem Pendidikan Merdeka Belajar berfokus pada pengembangan karakter siswa. Pembelajaran dapat dilakukan tidak hanya di dalam ruangan tetapi juga di luar ruangan.

Peran pendidikan Islam dalam kerangka sistem pendidikan Nasional adalah bahwa ia merupakan komponen dari sistem. Definisi pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan agama mengacu pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi peran yang melibatkan pemahaman ajaran agama atau menjadi ahli dalam ilmu agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana Sari Dangu), I Ketut Laba Sumarjiana), R.A. (2022) 'Sejarah Pendidikan Indonesia Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(6), pp. 1273-1284.
- Khotimah, A.H. *et al.* (2022) 'Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional', *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, 2(2), pp. 82-91. Available at: <https://doi.org/10.56672/attadris.v2i2.69>.
- M. Wahib MH *et al.* (2022) 'Studi Historis Perkembangan Sistem Pendidikan Di Indonesia', *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), pp. 83-90. Available at: <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.336>.
- Marisa, M. (2021) 'Inovasi Kurikulum "Merdeka Belajar" di Era Society 5.0', *Santhet: (Jurnal sejarah, Pendidikan dan Humaniora)*, 5(1), p. 72. Available at: <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.e-ISSN>.
- Putra, P.H. (2019) 'Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0', *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(02), pp. 99-110. Available at: <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i02.458>.

Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam

Vol 23 No 2 (2024) 918 - 925 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571

DOI: 10.17467/mk.v23i2.1507

Robiatul Awwaliyah, H.B. (2016) 'Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional', *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 12(1), p. 103. Available at: <https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.370>.

Triningsih, A. (2017) 'Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi', *Jurnal Konstitusi*, 14(2), p. 332. Available at: <https://doi.org/10.31078/jk1425>.